

JEMBATAN PENDAMAI SENGKETA

Penulis: Ruruh Handayani
Foto: Rivan Fazry

Ia menyelesaikan sengketa pajak sembari tetap menempatkan diri sebagai jembatan kepatuhan. Ia ingin orang kaya betah menanam modal di Indonesia.

Selepas *resign* dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Muhamad Fajar Putranto tak lantas hengkang dari dunia perpajakan. Tahun 2012, ia beranian diri membuka firma konsultan pajak TaxPrime bersama Soewito, mitra bisnisnya yang kini berperan sebagai senior partner.

Baik sebagai praktisi maupun pemimpin firma konsultan pajak, Fajar selalu menekankan untuk senantiasa berada di tengah kepentingan Wajib Pajak (WP) dan otoritas pajak. Menurutnya, tugas konsultan pajak berfungsi sebagai jembatan kepatuhan, supaya WP tidak mengalami sengketa atau masalah perpajakan yang sama di kemudian hari.

"Fungsi konsultan pajak itu untuk menjembatani. Kami ada di tengah—jangan sampai maksudnya DJP menginginkan apa, enggak sampai di Wajib Pajak," kata Fajar kepada *Majalah Pajak*, Jumat (24/6).

Berkecimpung di dunia perpajakan selama lebih dari 24 tahun, Fajar dikenal memiliki keahlian dalam merencanakan dan melaksanakan fasilitas fiskal dan kebijakan kepabeanan, mencegah dan menyelesaikan perselisihan yang melibatkan isu pajak domestik maupun internasional.

"Kalau DJP-nya sudah benar, *ngapain* kita ajukan keberatan? Sengketa-sengketa yang enggak layak buat kami sengketakan, kami filter," ujarnya.

Karena berpatokan pada mitigasi risiko perpajakan, TaxPrime hanya memiliki



Muhamad Fajar Putranto
Founder dan Managing Partner
TaxPrime

selected clients, yakni mereka yang condong pada ranah *compliance* atau kepatuhan pada peraturan yang berlaku.

"Bisnis konsultan pajak itu bisnis *trust*. Kalau yang gede saja *trust* sama kami, mudah-mudahan begitu juga dengan yang lebih kecil," imbuh pria kelahiran Jakarta 21 Februari 1975 ini.

Selama dua tahun berturut-turut, 2021 dan 2022, Fajar terpilih sebagai Tax Controversy Leader oleh *World Tax*. Tahun 2021, ia juga terdaftar sebagai Transfer Pricing Expert dari *World TP*.

**KALAU DJP-NYA SUDAH
BENAR, NGAPAIN KITA
AJUKAN KEBERATAN?
SENGKETA-SENGKETA
YANG ENGGAK LAYAK BUAT
KAMI SENGKETAKAN,
KAMI FILTER.**



Dalam waktu dekat, Fajar akan meluncurkan The Titan.Asia, sebuah *family office* yang fokus melayani WP Orang Pribadi yang kaya raya alias *high wealth individual* (HWI). *Family office* akan menawarkan solusi *outsourcing* total untuk mengelola keuangan dan investasi individu atau keluarga kaya, seperti penganggaran, asuransi, transfer kekayaan, hingga layanan perpajakan. Ia juga ingin membujuk HWI agar tetap menempatkan modal di dalam negeri tanpa perlu melakukan *tax planning* yang agresif.

Di luar itu, Fajar kian gemar menyuarakan gagasan seputar pajak. Ia pernah dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja tentang Rancangan Undang-Undang KUP—yang kini menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)—bersama Komisi XI DPR RI. Baru-baru ini, Fajar diminta menjadi pembicara tunggal di Kejaksaan Agung, Jakarta, dalam seminar pemanfaatan *blockchain* untuk penegakan hukum.

Ia saat ini juga asyik menekuni sistem *compliance by design* dari kaca mata hukum. Di tengah disrupsi global dan pesatnya digitalisasi, ia memimpikan Indonesia suatu saat bisa mengaplikasikan sistem ini. Dengan begitu, pemerintah—khususnya kepala negara—akan lebih simpel untuk mengelola sekaligus memonitor *real-time economy*, dan penyelewengan uang pajak akan terhindarkan.

Pada peringatan Hari Pajak kali ini, Fajar berharap perpajakan Indonesia bisa lebih bagus secara administrasi maupun pembayar pajaknya. Ia pun mengusulkan pemerintah bisa menggandeng HWI atau perusahaan besar untuk turut berpartisipasi dengan menayangkan pesan-pesan yang inspiratif di tempat-tempat strategis.

"Orang-orang kaya itu diajak peran serta, mengucapkan ini Hari Pajak. Gimana caranya, pengusaha itu bilanginya Hari Pajak ini bukan harinya orang pajak saja, tetapi hari kita juga," pungkasnya.